

BAB III

KEKUASAAN DALAM BUDAYA JAWA

A. Sejarah Kerajaan di Jawa

1. Sejarah Kerajaan Mataram yang Berpusat di Jawa Tengah

Mataram adalah sebuah kerajaan besar di pedalaman Jawa Tengah. Kerajaan Mataram di Jawa Tengah dapat dibagi atas tiga babak kekuasaan, yaitu zaman raja Sanjaya, zaman Rakai Pikatan dan zaman Raja Balitung.

a. Zaman Raja Sanjaya

Kerajaan Mataram terletak di Jawa Tengah, tepatnya disebuah barat daya Magelang, di gunung Wukir, di desa Canggal ditemukan sebuah prasasti yang menggunakan bahasa Sansekerta dalam huruf Pallawa. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa Raja Sanjaya memerintah sekitar tahun 732. Ia naik tahta menggantikan raja Sanna yang meninggal dunia. Di dalam prasasti ini disebutkan bahwa raja Sanjaya mendirikan Lingga di desa Kunjarakunja, yang terletak di sebuah pulau Jawa Dwipa yang kaya raya akan hasil bumi, terutama emas dan padi.²⁸

Jawa Dwipa mula-mula diperintah oleh raja Sanna yang memerintah dengan kebijaksanaan dan kehalusan budi. Setelah raja Sanna wafat,

²⁸ Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN)-LIPI., *op.cit.*, h. 174.

negaranya pecah. Anak Sannaha (saudara perempuan Sanna), naik tahta. Ia seorang raja yang ahli dalam kitab-kitab suci dan keprajuritan. Sanjaya menaklukkan berbagai daerah di sekitar kerajaannya dan menciptakan ketentraman dan kemakmuran yang dapat dinikmati oleh rakyatnya.

Mendirikan sebuah lingga secara khusus adalah lambang mendirikan suatu kerajaan. Dari prasasti-prasasti para raja Mataram yang menggantikan Sanjaya, dapat diketahui bahwa Sanjaya dianggap sebagai pangkal silsilah mereka. Dalam prasasti raja Balitung, disebutkan bahwa yang menjadi pangkal silsilah adalah "Raja Mataram Sang Ratu Sanjaya".

Pada pertengahan kedua abad ke-8, muncul wangsa Syailendra yang beragama Budha Mahayana dan berkuasa di Jawa Tengah bagian Selatan, sedangkan wangsa Sanjaya yang beragama Hindu masih terus berkuasa. Bagaimana jalannya pergeseran kekuasaan itu belum dapat diketahui, antara kedua wangsa ini terdapat kerja sama seperti digambarkan oleh prasasti Kalasan tahun 778.

b. Zaman Rakai Pikatan

Setelah raja Sanjaya wafat, Rakai Panangkaran menggantikan raja Mataram. Keterangan tentang raja itu ada di dalam prasasti Kalasan. Prasasti itu ditemukan di desa Kalasan tidak jauh dari candi Prambanan (Jawa Tengah).

Prasasti itu ditulis dengan huruf prenagari dan menggunakan bahasa Sanssekerta. Dari prasasti Canggal dapat diketahui bahwa raja Panangkaran berkuasa pada tahun 778²⁹.

Setelah Rakai Panangkaran wafat, yang berkuasa di Jawa Tengah adalah raja-raja keturunan Syailendra. Salah seorang raja Syailendra bernama Samaratungga, anaknya bernama Balaputra. Ia dikemudian berkuasa di Sriwijaya.

Pada pertengahan abad ke-9 kedua wangsa itu (Sanjaya dan Syailendra) bersatu melalui perkawinan Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya dengan Pramordawardhani, yang kemudian bergelar Sri Kahulunan, dari wangsa Syailendra. Dalam dua buah prasasti dari tahun 842 Sri Kaluhunan meresmikan pemberian tanah dan sawah untuk menjamin berlangsungnya pemeliharaan bangunan suci, yakni Borobudur yang mungkin sekali telah didirikan oleh Samaratungga tahun 824.

Setelah berhasil menghapus kekuasaan keluarga Syailendra di Jawa, Rakai Pikatan turun tahta pada tahun 856. Pengganti raja Pikatan ialah anaknya yang bernama Rakai Kayuwangi. Raja itu memerintah tahun 856-866. Raja selanjutnya ialah Rakai Watuhumalang dan raja Rakai Watukura Dyah Balitung.

²⁹ Edhie Wurjantoro, *Sejarah Nasional dan Umum I*, Depdikbud, Jakarta, 1996, h. 133.

c. Raja Balitung

Raja Balitung menduduki tahta Mataram dari 898 sampai 910. Prasasti-prasastinya ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga dapat disimpulkan ia adalah raja pertama yang memerintah kedua bagian pulau Jawa itu.

Dalam memerintah, Balitung dibantu oleh tiga orang Mahamantri (Maha=besar, mantri=menteri). Tiga mahamantri itu adalah mahamantri I Hino, mahamantri I Halu dan mahamantri I Sirikan. Selain itu ada sejumlah pejabat tinggi dan pejabat rendahan. Ia memerintah dengan amat bijaksana. Karena itu kerajaannya aman dan makmur.³⁰

Raja Balitung kemudian digantikan oleh Daksa pada tahun 910. Sebelum menjadi raja, Daksa pernah menjabat sebagai mahamantri I Hino. Jabatan ini adalah jabatan tertinggi setelah raja pada pemerintahan Balitung. Daksa memerintah hingga tahun 919. Ia kemudian berturut-turut digantikan oleh Raja Layang Dyah Tulodhong, kemudian Rakai Sumba Dyah Wawa. Raja Wawa memerintah hingga tahun 929. Pemerintahan kerajaan Mataram, di bawah Wawa berakhir dengan tiba-tiba, mungkin karena suatu bencana alam.

Letusan Gunung Merapi yang dahsyat, sehingga dalam anggapan para pujangga hal itu dianggap sebagai pralaya (kehancuran dunia pada akhir

³⁰ *Ibid.*, h. 138.

masa Kaliyuga), maka sesuai dengan landasan kosmologis kerajaan-kerajaan kuno haruslah dibangun kerajaan baru dengan wangsa yang baru pula. Karena itu Mpu Sindok yang membangun kembali kerajaan di Jawa Timur dianggap sebagai cikal bakal wangsa baru, yaitu wangsa Isana.³¹

2. Kerajaan Mataram yang Berpusat di Jawa Timur

Penguasa kerajaan Mataram di Jawa Timur ada dua yaitu, Mpu Sindok dan Airlangga.

a. Mpu Sindok

Mpu Sindok memerintah kerajaan Mataram di Jawa Timur pada tahun 929. Ia merupakan pendiri dinasti baru, yaitu dinasti Isana. Dinasti itu memerintah Jawa Timur hampir tiga abad lamanya. Pusat pemerintahannya berada di Watugaluh. Mpu Sindok memerintah hingga tahun 947. Ia memerintah dengan bijaksana. Berbagai usaha dilakukan untuk memakmurkan rakyatnya, antara lain membuat bendungan-bendungan untuk pengairan. Ia juga melarang rakyatnya menangkap ikan di bendungan itu pada siang hari karena untuk pelestarian sumber daya alam.

Meskipun ia beragama Hindu, Mpu Sindok memerintahkan untuk menggubah sebuah kitab suci agama Budha aliran Tantrayana. Buku itu

³¹ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia II, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, h. 157.

berjudul Sanghyang Kamahayanikan. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia memang mempunyai toleransi beragama yang tinggi.

Mpu Sindok memerintah di Medang, bersama dengan permaisurinya, Sri Wardhani, putri raja Wawa.

Pada tahun 947 Mpu Sindok digantikan oleh putrinya Sri Isyanatungawijaya, yang bersuamikan raja Lokapala. Dari perkawinan ini lahirlah anak laki-laki, Makutawangsawardhana, yang mempunyai anak perempuan bernama Mahendradata, bersuamikan raja Udayana dari wangsa Warmadewa yang memerintah di Bali.

Setelah Makutawangsawardhana meninggal, yang menjadi raja Mataram di Medang adalah Sri Dharmawangsa.

Pada tahun 990 Dharmawangsa berusaha keras untuk menundukkan Sriwijaya yang merupakan saingan berat, karena menguasai jalan laut India-Indonesia-Tiongkok.

Pada tahun 991 disusun sebuah kitab hukum yang disebut Siwasasana atas perintah Dharmawangsa, bagian dari kitab Bharatayudha disadur ke dalam bahasa Jawa kuno pada tahun 996.

Kerajaan Dharmawangsa mengalami pralaya atau kehancuran pada tahun 1016. Para raja dan para pembesar negara gugur dan menurut prasasti yang tersimpan di museum Calcuta, seluruh Jawa bagaikan suatu lautan.³²

Kerajaan Dharmawangsa mengalami kehancuran karena serangan Haji Wurawari, salah seorang raja bawahannya. Pada saat itu Dharmawangsa sedang menikahkan putrinya dengan Airlangga dari Bali. Dalam pertempuran itu Dharmawangsa terbunuh. Hanya Airlangga dan seorang pengiringnya, bernama Narotama yang berhasil meloloskan diri. Airlangga kemudian hidup di hutan bersama para pendeta.

b. Airlangga

Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1019, Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta Budha, Siwa dan Brahmana serta Narotama, pembantunya yang setia, menggantikan Dharmawangsa. Pada tahun 1029 Airlangga mulai membuat daerah-daerah yang dahulu dikuasai oleh Dharmawangsa. Raja Bhisma Prabhawa berhasil ditaklukkan pada tahun 1028-1029. Raja Wijaya dari wengkar ditaklukkan pada tahun 1030. Namun raja wengkar berontak kembali. Raja Adhana Panuda ditaklukkan pada tahun 1031. Raja wirawari takluk pada Airlangga tahun 1032. Akhirnya raja

³²

Tim Lembaga Reasearch Kebudayaan Nasional (LRKN)-LIPI., *op.cit.* h. 176.

B. Konsep Kekuasaan Raja Jawa Masa Lalu

Mencoba mengkaji dasar pemikiran kekuasaan Jawa untuk memahami dan menerangkan kehidupan kemasyarakatan dan politik. Koentjaraningrat, berpendapat bahwa unsur budaya merupakan variabel terpenting dan paling utama guna memahami perkembangan politik suatu bangsa karena budaya politik suatu bangsa atau masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau bangsa tersebut.³⁴

Kebudayaan dalam hal ini adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia. Kebudayaan tersebut memiliki unsur-unsur universal, yang juga merupakan isi dari seluruh kebudayaan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. sistem religi dan upacara keagamaan.
- b. sistem organisasi kemasyarakatan.
- c. sistem pengetahuan.
- d. sistem bahasa.
- e. sistem kesenian.
- f. sistem mata pencaharian hidup.

³⁴ Akhmad Setiawan, Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, h. 33.

g. sistem teknologi dan peralatan.³⁵

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, akan dapat dibahas konsep kekuasaan dari sudut pandang budaya Jawa. Kekuasaan digunakan sebagai alat analisis didasarkan pada kenyataan bahwa dalam ilmu politik kekuasaan dan gejala-gejala yang berkaitan dengannya sangat penting, karena kekuasaan menunjuk pada kegiatan, tingkah laku serta sikap dan keputusan-keputusan pelaku, kelompok, organisasi atau kolektivitas yang dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia. Manifestasinya lebih nampak pada kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijaksanaan dalam pembangunan.

Pada dasarnya kekuasaan raja-raja Mataram (1575-1755) bersifat absolut. Raja-raja Mataram adalah pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang dan hakim sekaligus. Ada tanda-tanda juga bahwa di antara raja Mataram ada yang bersifat tiran. Kekuasaan raja-raja Mataram memberi kesan begitu besar tanpa ada batasnya.

Bahwa kekuasaan raja-raja Mataram begitu besar sudahlah jelas. Di mata rakyat, kekuasaan itu terlebih-lebih terasa begitu besar, sehingga mereka mengakui raja sebagai pemilik segala sesuatu, baik harta benda maupun manusia. Karena itu terhadap keinginan raja, rakyat hanya dapat menjawab

³⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT.Gramedia, Jakarta, 1984, h. 2.

"ndherek karsa dalem" (terserah kepada kehendak raja). Kekuasaan yang demikian besar itu dikatakan "wenang wisesa ing sanagari" (berwenang tertinggi di seluruh negeri). Dalam pewayangan, kekuasaan yang besar itu biasa digambarkan sebagai "gung binanthara, bau dhendha nyakrawati" (terbesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia).³⁶

Dalam kedudukan sebagai penguasa negara, memang raja berhak mengambil tindakan apa saja dan dengan cara bagaimana saja terhadap kerajaannya, segala isi yang ada di dalamnya, termasuk hidup manusia. Karena itu kalau raja menginginkan sesuatu, dengan mudah ia akan memerintahkan untuk mengambilnya. Kalau yang merasa berhak atas sesuatu itu mempertahankannya, diperanginyalah dia. Sebaliknya kalau ada orang yang dianggap tidak pantas berada dalam kedudukannya, dengan mudah raja mengambil kedudukannya, dan membunuhnya bila perlu.

Melihat kekuasaan yang demikian besar itu, orang mungkin menjadi begitu takut kepada raja. Dalam keadaan demikian orang hanya dapat menunduk-nunduk di hadapan raja. Kalau berbicara mesti menyembah dulu. Berkali-kali ia berbicara berarti berkali-kali ia menyembah.

Raja yang dikatakan baik adalah raja yang menjalankan kekuasaannya dalam keseimbangan antara kewenangannya yang besar dengan kewajibannya

³⁶ Drs.G.Moedjanto, M.A., Konsep Kekuasaan Jawa, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h. 78.

yang besar juga. Kekuasaan yang besar di satu pihak dan kewajiban seimbang di lain pihak merupakan isi konsep kekuasaan Jawa seperti dicerminkan dalam kekuasaan raja-raja Mataram. Itulah konsep keagunbinataran.

Akan tetapi menyebut konsep itu dalam kependekan yang demikian saja dapat menyesatkan, karena orang dapat melupakan kelanjutannya yang esensial, yaitu berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta. Sifat ini tidak mengurangi besarnya kekuasaan raja, melainkan mengimbangnya. Ia boleh saja membunuh lawannya asal syarat adil dipenuhi. Raja boleh saja mengambil "istri" orang lain asal diberi ganti yang seimbang, terhadap mereka yang berjasa, raja wajib memberi ganjaran. Bila raja menindak orang lain yang bersalah, ia harus menindak anaknya sendiri kalau ternyata anaknya bersalah. Raja yang demikian itu akan mendapat pujian yang begitu tinggi dari rakyat yang menjadi kawulanya. Begitu tingginya penghormatan dan pujian itu sehingga raja yang demikian itu digambarkan bukan lagi sebagai manusia biasa, melainkan manusia luar biasa dengan kesaktian yang menumpuk tiada taranya. Semua orang rela pasrah kepada raja karena mereka tahu dengan ciri watak demikian itu hanya mendatangkan serba kebaikan bagi dirinya maupun orang lain tanpa kecuali. Di lain pihak raja pun kemudian merasa bahwa dirinya mempunyai serba hak dan kekuasaan mutlak untuk mengatur negara.

✕ Ciri-ciri yang terkandung dalam konsep keagungbinataraan itu pada zaman Mataram berkembang lebih lanjut dalam bentuk penggunaan gelar-gelar, yaitu panembahan, sunan dan sultan yang diikuti oleh kalimat "senapati ing ngalaga sayidin panatagama khalifatullah".³⁷

Kekuasaan raja (ratu) dalam paham Jawa dapat dimengerti sebagai orang yang memusatkan suatu takaran kekuatan kosmis yang besar dalam dirinya sendiri. Sebagai orang yang sakti, kesaktian sang raja diukur pada besar kecilnya monopoli kekuasaan yang dipegangnya. Kekuasaannya semakin besar, semakin luas wilayah kekuasaannya dan semakin eksklusif segala kekuatan dalam kerajaannya berasal dari padanya.

Kekuasaan raja juga nampak dalam kesuburan tanah dan apabila tidak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi dan gempa bumi. Karena semua peristiwa alam berasal dari kekuatan kosmis yang sama yang dipusatkan dalam diri raja, maka apabila kekuasaannya betul-betul menyeluruh maka terlepas dari raja. Tidak mungkin ada kekuatan-kekuatan termasuk kekuatan-kekuatan alam yang masih bisa bergerak. Oleh karena itu kekuasaan raja kentara dalam keteraturan dan kesuburan masyarakat dan alam. Jadi apabila semuanya tentram, bila tanah memberikan panen yang berlimpah-limpah, bila setiap penduduk dapat makan dan berpakaian secukupnya, dan

³⁷ *Ibid.*, h. 81.

semua orang merasa puas, suatu keadaan yang oleh orang Jawa disebut sebagai adil makmur. Masyarakat semacam itu merealisasikan cita-cita Jawa tentang keadaan yang tata tentrem karta raharja.

Bagi rakyat Jawa, keraton itu bukan hanya suatu pusat politik dan budaya; keraton merupakan pusat keramat kerajaan. Keraton adalah tempat raja bersemayam dan raja merupakan sumber kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketentraman, keadilan dan kesuburan. Paham itu terungkap dengan jelas dalam gelar para penguasa keempat kerajaan di Jawa Tengah hasil perpecahan kerajaan Mataram II, dua ratus tahun yang lalu. Kedua penguasa Yogyakarta menyebut diri Hamengku Buwana (yang memangku jagad raya) dan Paku Alam, para penguasa Surakarta bernama Paku Buwana (paku jagad raya) dan Mangkunegara (yang memangku negara).³⁸

Sebagai pusat kekuasaan atau politik, keraton memiliki kemampuan mengatur seluruh dimensi kehidupan. Dengan kekuasaan politik yang ada padanya ia mampu mengendalikan pemerintahan di seluruh negeri, yang diwarnai oleh berbagai macam simbol kerajaan seperti terlihat dalam berbagai upacara seremonial, seperti alat-alat upacara yang mahal, proses upacara yang rumit, hadirnya begitu banyak pembesar dengan busana gemerlapan, prajurit yang berjumlah besar, atraksi kesenian yang halus, indah dan megah.

³⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h. 107.

Dengan kekuasaan yang besar pula maka keraton dapat menjadi patron bagi berkembangnya kegiatan ekonomi. Keraton juga mampu mempekerjakan punggawa-punggawa yang berkewajiban untuk mengembangkan sastra dalam arti luas yang mencakup etika (filsafat perilaku dan ajaran baik-buruk), babad sejarah tradisional, gendhing atau nyanyian (kampung gendhingan). Keraton juga menjadi pelindung kemajuan agama.³⁹

Dari keterangan di atas, maka nyata bahwa keraton jaman dulu berkiprah dalam berbagai dimensi kehidupan: politik, etika, ekonomi dan kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya menyangkut kesenian saja.

Di jaman pra-Islam, raja dipandang sebagai penjelmaan dewa (raja dewa) atau sebagai asal dari dewa. Dan walaupun agama Islam yang antara abad XIV dan XVII meresapi seluruh pulau Jawa menolak gagasan raja -dewa, namun paham lama itu tetap bertahan.

Pengaruh Hindu pula yang mempengaruhi sistematika pandangan manusia dalam bentuk hierarkis. Manusia menurut pandangan ini secara moral dan mistis tidaklah sederajat. Para penguasa duniawi dan kaum priyayi dipandang lebih tinggi dan lebih halus. Yaitu lebih dekat pada kebenaran dan dalam keadaan yang lebih menguntungkan untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan kosmos dibandingkan dengan manusia rendahan yang kasar, yang

³⁹ Drs.G.Moedjanto,M.A., Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h. 40.

demi kelangsungan hidupnya lebih menguntungkan daripada dunia. Karena pemikiran ini, banyak ningrat atau priyayi yang berorientasi ke keraton menekankan perlunya sikap hormat kepada keteraturan hierarkis sebagai langkah awal dalam perjalanan manusia kepada Tuhan: "bila seseorang menghormati saudara tua, orang tua, guru dan rajanya, maka orang itu menghormati Tuhan".⁴⁰

Dalam Serat Wirid Hidayat Jati, sebuah kitab Jawa yang sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam disebutkan:

"Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaKu. Dan Aku ini rahasia manusia. Sebab Aku menciptakan Adam, berasal dari empat hal: 1.bumi, 2.api, 3.angin, 4.air. Itu yang merupakan wujud sifat-sifatKu. Di situ Aku memasukkan zat makhluk lima hal; 1.nur, 2.rahasia, 3.roh, 4.nafsu, 5.budi. Itu semua merupakan dinding wajahKu yang Maha Suci."⁴¹

Pada hakekatnya, setiap kenyataan mengenai kekuasaan selalu bertentangan dengan suatu kenyataan yang ekuivalen di dalam tradisi Jawa dan dari hubungan-hubungan antara kenyataan-kenyataan yang bertentangan inilah diperoleh hubungan timbal balik dan persesuaian tradisi tersebut.

³⁸Fachry Ali, *Refleksi Paham "Kekuasaan Jawa" dalam Indonesia Modern*, PT.Gramedia, Jakarta, 1986, h. 2.

³⁹R.Ng.Ronggowarsito, *Wirid Hidayat Jati*, Dahara Prize, Semarang, 1997, h. 21.

1. Kekuasaan itu konkrit

Bagi orang Jawa, kekuasaan itu ada, tidak tergantung dari orang yang mungkin menggunakannya. Kekuasaan bukan suatu anggapan teoritis, melainkan suatu realitas yang ada. Kekuasaan adalah daya yang tidak bisa diraba, penuh misteri dan bersifat ketuhanan yang menghidupkan alam semesta. Kekuasaan terwujud dalam setiap aspek dunia alami, pada batu, kayu, awan dan api. Tetapi semua itu dinyatakan secara murni dalam misteri pokok kehidupan, yaitu proses generasi dan regenerasi. Dalam pemikiran tradisional Jawa, tidak ada garis batas yang tegas antara zat organis dan zat anorganis, karena segala sesuatunya ditopang oleh kekuasaan yang tidak terlihat. Konsep yang menyatakan bahwa seluruh kosmos ini dipenuhi oleh suatu daya tarik yang tidak terbentuk, tetapi selalu kreatif telah merupakan kaitan dasar antara animisme yang terdapat di desa-desa Jawa dan paham panteisme metafisik tinggi yang terdapat di pusat-pusat perkotaan.

2. Kekuasaan itu homogen

Dari konsep ini timbul pendapat bahwa semua kekuasaan itu sama jenisnya dan sama pula sumbernya. Kekuasaan di tangan satu individu atau satu kelompok adalah identik dengan kekuasaan yang ada di tangan individu atau kelompok lain manapun.

3. Jumlah kekuasaan di alam semesta tetap

Menurut pandangan orang Jawa, alam semesta tidak bertambah luas dan tidak pula bertambah sempit. Demikian juga jumlah kekuasaan itu ada begitu saja dan bukan merupakan hasil dari organisasi. Kekayaan, persenjataan dan lain-lain, malah lebih dulu daripada lainnya dan membuat semuanya seperti adanya. Maka jumlah keseluruhannya tidak berubah. Walaupun pembagian kekuasaan di satu pihak atau pada satu orang mengharuskan pengurangan jumlah kekuasaan di tempat lain dalam jumlah yang sebanding.

4. Kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan.

Karena semua kekuasaan berasal dari sumber tunggal yang homogen, maka kekuasaan itu sendiri lebih dulu ada daripada masalah-masalah baik dan buruk. Menurut cara pemikiran orang Jawa, menuntut hak berkuasa berdasarkan sumber-sumber kekuasaan yang berbeda-beda tidak akan ada artinya. Bagi orang Jawa, hal semacam itu tidak relevan dipertanyakan. Sebab, "kekuasaan tidak absah dan bukan pula tidak absah. Yang penting, kekuasaan itu ada". Dengan demikian, orang Jawa memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang konkrit homogen, tetap jumlah keseluruhannya dan sebagai kekuasaan tidak mempunyai implikasi moral yang inheren.⁴²

⁴² Benedict R.O.G. Anderson, Gagasan Tentang Kekuasaan di dalam Kebudayaan Jawa, Pelayanan Rohani Mahasiswa, Yogyakarta, 1972

Apapun bentuknya kemudian, konsep-konsep tentang raja di dalam perspektif budaya Jawa merupakan kombinasi pengaruh antara ajaran-ajaran Islam dan Hindu-Budha. Dalam hal ini tampak jelas bahwa berbagai pengaruh yang masuk, semakin memperkaya konsepsi raja. Karena itu tidaklah mengherankan kalau ungkapan yang terkandung dalam *wenang murba wisesa* menyatakan bahwa kekuasaan absolut raja yang diturunkan dari kekuasaan Tuhan memperlihatkan sekali lagi posisi raja sebagai refleksi Tuhan.⁴³

Karena itu betapapun terjadi kegoncangan-kegoncangan kekuasaan misalnya, pecahnya kerajaan Mataram menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta pada tahun 1775, kepercayaan rakyat tetap tidak bergeming kepada raja. Hal ini dapat dikarenakan raja atau sultan memiliki kekuatan-kekuatan magis yang melekat pada benda-benda suci milik raja, yang tidak dapat dipisahkan dari raja.

Menurut Selo Soemardjan, sampai sekarang rakyat Yogya tetap percaya bahwa pusaka-pusaka tertentu dalam istana Sultan (tombak, keris atau panji) mempunyai kekuatan magis, yang membantu setiap raja yang secara sah dan kosmologis berhak memerintah.⁴⁴ Satu hal lagi yang menyebabkan tidak goyahnya kepercayaan rakyat terhadap raja adalah bahwa raja memiliki

⁴³ Fachry Ali, *op.cit.*, h. 30.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 27.

kesanggupan untuk berhubungan dengan arwah nenek moyangnya dan dalam konteks raja Mataram dengan Nyai Roro Kidul, ratu perkasa dari Lautan Hindia; para pelindung surgawi dari gunung Merapi dan gunung Lawu di Jawa Tengah juga dianggap sebagai pelindung yang menjaga sultan, kerajaan dan rakyatnya.

Untuk memahami semua itu, kita harus kembali kepada hubungan kawula-gusti. Dalam mistik Jawa, kata-kata jumbuhing kawula gusti (kesatuan manusia dengan Tuhan) menggambarkan tujuan tertinggi manusia, yaitu pencapaian "kesatuan" akhir dengan Tuhan (manunggal). Sebagian dari pencapaian petunjuk-petunjuk Tuhan dilakukan dengan semedi, suatu usaha untuk mempelajari pengetahuan tentang kehendak Tuhan atau untuk meramal hari depan. Dalam perspektif Babad Tanah Jawi, ini dijelaskan sebagai neges karsaning hyang ingkang murbeng pandalu (mencoba memahami apa yang dilihat) atau lebih sering lagi disebut maneges karsaning Pangeran (mencoba untuk memahami kehendak Tuhan). Kehendak Tuhan itu tidak pernah terlihat dengan jelas, kecuali secara tidak langsung, dalam pralambang tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi antara pencipta dengan makhluk, melainkan juga secara sangat intensif, antara manusia dengan manusia yang juga berlaku secara tidak langsung.⁴⁵

⁴⁵

Ibid., h. 28.

C. Konsep Kekuasaan Presiden Masa Orde Baru

Kepemimpinan orde baru muncul menggantikan suatu masa di mana kekuasaan terdistribusi di antara tiga kekuatan utama: Presiden, Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat. Dalam formasi itu presiden menjadi sentral. Masa ini yang kemudian dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Ketika orde baru muncul, distribusi kekuasaan mengalami perubahan besar. Angkatan Darat dan militer secara umum muncul sebagai kekuatan politik utama.

Sepanjang sejarah orde baru, kita dapat mengidentifikasi adanya dua pola distribusi kekuasaan yang berbeda. Pola pertama terbentuk pada masa konsolidasi awal orde baru, pada saat di mana presiden muncul sebagai kekuatan politik mandiri dan masih terkolektifikasi di dalam kekuatan angkatan darat atau militer. Pola kedua segera terbentuk setelah Golongan Karya (Golkar) memenangkan dua kali pemilu sehingga penguasa orde baru memiliki legitimasi politik yang konkrit dan kokoh. Pada pola kedua, presiden perlahan namun pasti mencuat sebagai kekuatan politik yang mandiri dan akhirnya menjadi sentral kekuasaan.⁴⁶

Seperti telah kita ketahui bahwa yang menjadi titik awal orde baru adalah lahirnya surat perintah sebelas maret 1966 atau lebih dikenal dengan

⁴⁶ R.Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 39.

nama Supersemar⁴⁷ Sementara itu orde baru lahir karena kondisi dalam negeri Indonesia sangat kacau, banyak terjadi kemelut yang dipandang oleh rakyat sebagai suatu kebijaksanaan yang tidak mencerminkan gejolak yang timbul di kalangan masyarakat karena tidak bijaksananya pemimpin negara pada waktu itu.

Dalam masa 1966-1967 (masa transisi) terdapat dualisme dalam kepemimpinan nasional, di satu pihak presiden Soekarno yang masih aktif sebagai presiden dan di lain pihak adanya tokoh jenderal Soeharto yang semakin populer berkat partisipasinya menumpas pemberontakan G-30-S/PKI dalam waktu yang singkat, serta melaksanakan dengan pasti usaha-usaha stabilitas politik dan ekonomi berdasarkan surat perintah 11 Maret 1966.

Pada hari Kamis pukul 19.30 bertempat di istana negara, dengan disaksikan oleh ketua presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden/mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan remisi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto.⁴⁸

Memasuki tahun kedua Pelita I, pemerintah bersama DPR.GR menyelesaikan berbagai macam undang-undang yang berkaitan dengan

⁴⁷ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, h. 413.

⁴⁸ Ibid, h. 425.

pemerintahan. Salah satu diantaranya ialah undang-undang yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah sesuai dengan keputusan MPRS. Sementara itu untuk melancarkan jalannya pembangunan telah berhasil dirintis hubungan tata kerja yang konstitusional antara lembaga-lembaga tertinggi. Dengan adanya hubungan kerja yang konstitusional ini maka konsolidasi berlangsung dengan baik dan lancar.

Dalam praktik politik orde baru, posisi puncak hierarki diduduki "sendiri" oleh presiden. Hal ini dimungkinkan oleh dua hal:

1. Dalam sistem politik masa orde baru pada dasarnya tidak menempatkan wakil presiden sebagai pemegang kunci dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan riil dan prinsipil⁴⁹. Wapres dalam praktek politik orde baru hanya ditempatkan sebagai "ban serep semata".
2. "Kesendirian" presiden dalam hierarkis puncak dibentuk pula oleh keberhasilan presiden dalam mengatur tata kerja para pembantunya, dari tingkat menteri sampai eselon terbawah.

Dalam perkembangannya, pembantu-pembantu presiden tidak hanya wakil presiden dan para menteri, tetapi ditambah dengan bermacam-macam pejabat yang bukan menteri, yang dinamakan unsur birokrasi pemerintah. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

⁴⁹ R.Eep Saefulloh Fatah, *op.cit.*, h. 39.

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Serta dalam pasal 17 ayat 1 yang berbunyi: "Presiden dibantu oleh menteri -menteri negara."

Sulit dibantah bahwa presiden Soeharto telah mencapai puncak hierarki kekuasaan sistem politik Indonesia dalam pengertian sesungguhnya dan pada saat yang sama telah berhasil pula memposisikan para pembantunya dalam kedudukan yang manusus dan "mengabdikan" kepadanya. Orientasi tindakan-tindakan orang disekitar presiden Soeharto dapat dikatakan dikendalikan oleh presiden Soeharto dengan cara yang halus. Kenyataan ini antara lain terefleksikan dalam ungkapan yang amat populer di kalangan menteri-menteri "atas petunjuk bapak presiden". Sementara itu kedudukan dan kesendirian presiden dalam puncak hierarki juga dibentuk secara sangat halus dan canggih sedemikian rupa sehingga hal itu tidak menjadi persoalan politik yang mencolok.

Hal ini sebagaimana diakui oleh presiden Soeharto dalam otobiografinya, yang dilandasi oleh dua faktor yaitu:

1. Secara yuridis formal, konstitusi memang menempatkan menteri dan aparat pemerintahan lainnya sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
2. Presiden Soeharto berhasil menempatkan dan mengatur para pembantunya (entah itu teknokrat maupun militer) dengan sistem kerja yang ketat dan terkendali.⁵⁰

⁵⁰ R.Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 40.